

Analisis Determinan Kemiskinan Kabupaten di Pulau Sumatera

Muhammad Chandra Gunawan^{1*}, Arivina Ratih Yulihar Taher²,
& Resha Moniyana Putri³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung,
Bandar Lampung, Indonesia

*e-mail : chandragunawan839@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

1 May 2026

Revised :

2 May 2026

Accepted :

11 May 2026

Kata Kunci :

Akses Air Layak,
Kemiskinan Sumatera,
Pendidikan Tamat SMA,
Pengeluaran Makanan,
Pekerja Pertanian

Keywords:

*Clean Water Access, Food
Expenditure, High School
Education, Poverty in
Sumatra, Agricultural
Employment*

Meskipun Pulau Sumatera merupakan kontributor PDB nasional terbesar kedua, kemiskinan kabupaten di wilayah ini tetap persisten dengan tingkat rata-rata 3–5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan wilayah kota, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan di level kabupaten. Penelitian ini menganalisis determinan kemiskinan tingkat kabupaten di Pulau Sumatera periode 2015–2025 menggunakan data panel 120 kabupaten dari 10 provinsi di Sumatera. Empat variabel diteliti: pendidikan, pekerja sektor pertanian, pengeluaran per kapita makanan, dan akses air minum layak, diestimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil menunjukkan pendidikan dan akses air layak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sementara dominasi pekerja pertanian justru memperburuknya. Pengeluaran makanan tidak berpengaruh signifikan. Model memiliki daya jelaskan yang sangat kuat (Adjusted R²=0,944). Implikasi kebijakan: perluasan pendidikan menengah, diversifikasi ketenagakerjaan non-pertanian, dan investasi infrastruktur air bersih di kabupaten dengan kemiskinan tinggi.

Determinants of District-Level Poverty in Sumatra Island

ABSTRACT

Despite being the second-largest contributor to Indonesia's national GDP, district-level poverty in Sumatra Island remains persistent, averaging 3–5 percentage points higher than urban areas, indicating that economic growth does not automatically reduce poverty at the district level. This study analyzes the determinants of district-level poverty in Sumatra Island during 2015–2025 using panel data from 120 districts across 10 provinces, estimated through the Fixed Effect Model (FEM). Four variables were examined: education, agricultural workers, food expenditure, and access to clean drinking water. Results show that education and clean water access significantly reduce poverty, while a high share of

agricultural workers worsens it. Food expenditure is insignificant. The model demonstrates strong explanatory power (Adjusted R²=0.944). Policy implications emphasize expanding secondary education, diversifying employment beyond agriculture, and prioritizing clean water infrastructure in high-poverty districts.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang masih menjadi tantangan utama pembangunan global dan nasional. World Bank (2025) mencatat bahwa sekitar 10,1 persen populasi dunia atau lebih dari 831 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem sebesar \$3,00 per hari. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dan paling fundamental dengan target menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2030, namun laporan terbaru mengindikasikan target tersebut berisiko tidak tercapai, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi tekanan berlapis dari ketimpangan struktural (United Nations, 2025).

Di Indonesia, tingkat kemiskinan nasional turun dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Namun laju penurunan dalam satu dekade terakhir menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang mengkhawatirkan. Pada periode 2015–2024, penurunan kemiskinan nasional hanya berkisar 2,65 poin persentase dalam sembilan tahun, tiga kali lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2025a). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemiskinan yang tersisa semakin bersifat kronis dan struktural, di mana lebih dari 75 persen kemiskinan di Indonesia bersifat kronis dan diwariskan antargenerasi (Sugiharti et al., 2023).

Pulau Sumatera menyajikan paradoks pembangunan yang mencolok. Sebagai kontributor PDB nasional terbesar kedua dengan sumbangan sekitar 21,7 persen dan kekayaan sumber daya alam berlimpah, beberapa provinsinya justru masih masuk dalam sepuluh provinsi termiskin di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025b). Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan di wilayah kabupaten yang secara konsisten 3–5 poin persentase lebih miskin dibandingkan kota dalam provinsi yang sama (Priyarsono et al., 2022). Tabel 1 memperlihatkan bahwa empat dari sepuluh provinsi termiskin di Indonesia berada di Pulau Sumatera.

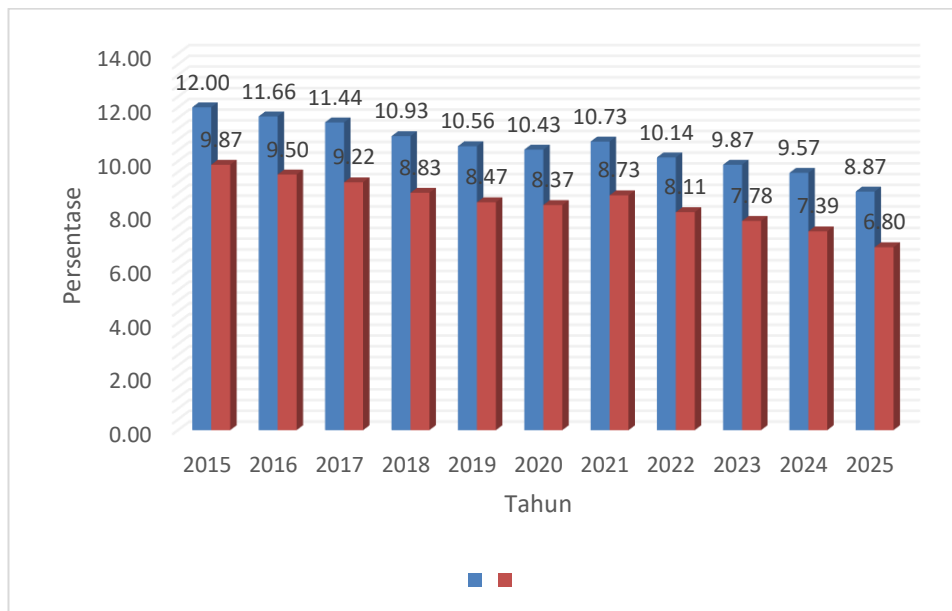
Tabel 1. Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1	Jawa Timur	3.840.085
2	Jawa Barat	3.602.725
3	Jawa Tengah	3.355.755
4	Sumatera Utara *)	1.134.155
5	Nusa Tenggara Timur	1.060.235
6	Sumatera Selatan *)	908.920
7	Lampung *)	873.575
8	Banten	766.815
9	Aceh *)	704.010
10	Sulawesi Selatan	691.635

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025); *) Provinsi di Pulau Sumatera

Kesenjangan kemiskinan antara kabupaten dan kota di Sumatera mencerminkan perbedaan struktural yang mengakar antara dua tipologi wilayah tersebut. Data BPS (2025)

menunjukkan bahwa dari 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatera, 120 di antaranya berstatus kabupaten dengan rata-rata tingkat kemiskinan 3–5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan 34 wilayah kota. Kondisi ini secara empiris membuktikan bahwa kesenjangan kemiskinan desa-kota di Indonesia bersifat persisten, dengan determinan yang berbeda antara kedua level wilayah, sehingga kebijakan yang berlaku untuk kota tidak serta-merta efektif untuk kabupaten (Priyarsono et al., 2022). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, tingkat kemiskinan kabupaten secara konsisten lebih tinggi dibandingkan kota pada setiap tahun pengamatan 2015–2025, dengan selisih yang relatif stabil. Meskipun tren penurunan terjadi di kedua tipologi wilayah, kemiskinan kabupaten tetap berada di atas kota hingga akhir periode pengamatan (Badan Pusat Statistik, 2025a). Pola ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Sumatera lebih terkonsentrasi di wilayah kabupaten, yang umumnya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan produktif, dan infrastruktur dasar (Purmini & Rambe, 2021).



Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah, 2025.

Gambar 1. Perbandingan Rata-Rata Tingkat Kemiskinan (P0) Kabupaten vs Kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2025

Determinan kemiskinan kabupaten Sumatera bersifat multidimensi. Pada dimensi SDM, rata-rata hanya 22,62 persen penduduk miskin yang menyelesaikan SMA ke atas, jauh di bawah rata-rata nasional. Rendahnya capaian pendidikan ini relevan karena modal manusia merupakan jalur utama keluar dari kemiskinan: pendidikan membuka akses ke pekerjaan formal dan meningkatkan daya tawar upah (Haidir & Setyari, 2024). Pada dimensi ketenagakerjaan, dominasi sektor pertanian dengan rata-rata 38,60 persen penduduk miskin bekerja di sektor ini mencerminkan perangkap struktural, di mana surplus tenaga kerja terserap pada aktivitas dengan produktivitas marginal rendah, perpindahan ke sektor non-pertanian terbukti menjadi salah satu rute paling efektif keluar dari kemiskinan kronis (Moeis et al., 2020; Nasrun et al., 2020).

Pengeluaran pangan rata-rata 63,80 persen mencerminkan kerentanan tinggi sesuai Hukum Engel, namun hubungannya dengan kemiskinan bersifat ambigu karena mekanisme yang bekerja berbeda antarwilayah (Mailyn & Kartika, 2025; Purbowo, 2025). Sementara itu, akses air layak yang hanya 62,47 persen di kabupaten Sumatera, jauh di bawah rata-rata

nasional 83 persen yang merupakan hambatan ganda: secara langsung menggerus kesehatan dan produktivitas, sekaligus membebankan pengeluaran ekstra pada rumah tangga miskin yang terpaksa membeli air dari vendor (Mulyaningsih et al., 2023; Sukartini & Saleh, 2020).

Berbagai studi telah mengkaji determinan kemiskinan di Indonesia, namun analisis simultan keempat dimensi ini pada level kabupaten di seluruh Pulau Sumatera selama satu dekade implementasi Dana Desa (2015–2025) masih terbatas (Budiono & Purba, 2021; Dartanto & Nurkholis, 2022; Putri & Samsuddin, 2025; Suparta & Oktaviani, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi keempat variabel dalam satu model dengan 1.320 observasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan, pekerja sektor pertanian, pengeluaran makanan, dan akses air layak terhadap kemiskinan 120 kabupaten di Pulau Sumatera periode 2015–2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan data panel seimbang (*balanced panel*). Unit analisis mencakup 120 kabupaten dari 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2015–2025 (11 tahun, total 1.320 observasi). Wilayah kota tidak diikutsertakan karena determinan kemiskinan kabupaten dan kota berbeda secara struktural (Priyarsono et al., 2022). Seluruh data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (P0) berupa Head Count Index. Definisi operasional seluruh variabel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Sumber
Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (Head Count Index/P0)	Persen	BPS
Pendidikan (X1)	Proporsi penduduk miskin yang menyelesaikan pendidikan minimal SMA/ sederajat	Persen	BPS
Pekerja Pertanian (X2)	Proporsi penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian sebagai pekerjaan utama	Persen	BPS
Pengeluaran Makanan (X3)	Persentase pengeluaran per kapita rumah tangga miskin untuk konsumsi makanan	Persen	BPS
Akses Air Layak (X4)	Persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum layak sesuai standar kesehatan	Persen	BPS

Sumber: BPS, berbagai tahun.

Model regresi data panel yang diestimasi adalah :

$$P0_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PEND}_{it} + \beta_2 \text{PSP}_{it} + \beta_3 \text{PPM}_{it} + \beta_4 \text{AL}_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

Dimana $P0_{it}$ adalah tingkat kemiskinan kabupaten ke- i tahun ke- t ; PEND_{it} adalah proporsi penduduk miskin tamat SMA ke atas; PSP_{it} proporsi penduduk miskin bekerja di sektor pertanian; PPM_{it} persentase pengeluaran makanan; AL_{it} persentase akses air minum layak; μ_i efek tetap spesifik kabupaten; dan ε_{it} komponen error.

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow (CEM vs FEM) dan Uji Hausman (FEM vs REM). Pengujian asumsi klasik meliputi normalitas (skewness-kurtosis), multikolinearitas (matriks korelasi), heteroskedastisitas (regresi residual absolut), dan

autokorelasi (Durbin-Watson). Seluruh estimasi menggunakan EViews 12 (Gujarati & Porter, 2009; West et al., 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup 120 kabupaten dari 10 provinsi: Aceh (18), Sumatera Utara (25), Sumatera Barat (12), Riau (10), Kepulauan Riau (5), Jambi (9), Sumatera Selatan (13), Bangka Belitung (6), Bengkulu (9), dan Lampung (13). Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif seluruh variabel penelitian.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N=1.320, 2015–2025)

Statistik	Y (%)	X1 (%)	X2 (%)	X3 (%)	X4 (%)
Mean	11,46	22,62	38,60	63,80	62,47
Median	10,44	21,07	38,13	63,99	62,98
Maksimum	34,08	60,99	86,49	78,73	100,00
Minimum	2,46	1,70	0,00	50,67	2,32
Std. Deviasi	5,18	9,78	17,63	3,95	22,45

Sumber: BPS, diolah dengan EViews 12, 2026.

Rata-rata kemiskinan 11,46 persen dengan rentang 2,46%–34,08% mencerminkan heterogenitas tinggi antarwilayah. Rata-rata pendidikan hanya 22,62 persen mengindikasikan lebih dari tiga perempat penduduk miskin belum menyelesaikan SMA. Dominasi pertanian 38,60 persen mencerminkan perangkap kemiskinan struktural. Pengeluaran makanan 63,80 persen mengonfirmasi Hukum Engel, sementara akses air layak 62,47 persen jauh dari target SDGs 2030.

Uji Chow menghasilkan Cross-section F = 243,857 dan Chi-square = 3805,083 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), sehingga FEM lebih tepat dari CEM. Uji Hausman menghasilkan Chi-square = 12,948 dengan probabilitas 0,0115 ($< 0,05$), sehingga FEM lebih tepat dari REM. Seluruh uji asumsi klasik terpenuhi: residual normal, tidak ada multikolinearitas (korelasi antar-X tertinggi = 0,38), homoskedastis (seluruh $p > 0,05$), dan tidak ada autokorelasi (DW = 1,1668).

Hasil estimasi Fixed Effect Model disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.	Ket.
C (Konstanta)	14,87939	0,839632	17,72133	0,0000	***
X1 – Pendidikan	-0,032220	0,005103	-6,314415	0,0000	***
X2 – Pertanian	+0,011469	0,002917	+3,931764	0,0001	***
X3 – Peng. Makanan	-0,019507	0,012461	-1,565479	0,1177	ts
X4 – Air Layak	-0,030183	0,001949	-15,48661	0,0000	***
R-squared	0,9493	Adj. R ²	0,9441		
F-statistic	182,1576	Prob(F)	0,0000		

Ket.: *** = signifikan α 1%; ts = tidak signifikan. Sumber: Output EViews 12, diolah, 2026.

Pembahasan

Pertama, pendidikan (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan ($\beta=-0,032$; $p<0,01$). Setiap peningkatan 1 persen proporsi penduduk miskin yang tamat SMA ke atas menurunkan kemiskinan sebesar 0,032 poin persentase. Temuan ini konsisten dengan teori human capital yang menyatakan pendidikan meningkatkan produktivitas dan akses ke pasar kerja formal (Becker, 1975). Secara empiris, hasil ini juga mempertegas temuan sebelumnya bahwa pendidikan menengah berperan signifikan dalam menurunkan kemiskinan di kabupaten Sumatera Barat (Alifah et al., 2020), di mana tambahan satu tahun sekolah berkorelasi dengan penurunan kemiskinan sebesar 1,32 persen (Adam et al., 2022). Selain itu, pendidikan juga diidentifikasi sebagai variabel yang paling dominan dalam menjelaskan variasi kemiskinan nasional (Faizal et al., 2025).

Kedua, pekerja sektor pertanian (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan ($\beta=+0,011$; $p<0,01$). Mayoritas pekerja miskin di kabupaten Sumatera adalah petani subsisten atau buruh tani dengan pendapatan tidak stabil. Temuan ini merefleksikan mekanisme dalam model dual economy yang menggambarkan sektor pertanian tradisional sebagai penyerap surplus tenaga kerja dengan produktivitas marginal sangat rendah (Lewis, 1954). Sejumlah studi juga menunjukkan pola yang sejalan, di mana pekerjaan di sektor pertanian meningkatkan risiko kemiskinan kronis hingga dua kali lipat (Sugiharti et al., 2023), sementara mobilitas tenaga kerja menuju sektor non-pertanian terbukti menurunkan probabilitas kemiskinan sebesar 13,5 poin persentase (Moeis et al., 2020).

Ketiga, pengeluaran makanan (X3) menunjukkan arah negatif namun tidak signifikan secara statistik ($p=0,118$). Tidak terdugungnya signifikansi ini mengindikasikan adanya dualisme dalam literatur, di mana pada wilayah dengan daya beli relatif tinggi, peningkatan konsumsi mencerminkan perbaikan kesejahteraan (Maily & Kartika, 2025). Sebaliknya, pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih dalam, peningkatan pengeluaran pangan justru mencerminkan tekanan konsumsi dasar (Huda et al., 2023; Purbowo, 2025). Dalam konteks heterogenitas 120 kabupaten di Sumatera, kedua mekanisme tersebut beroperasi secara simultan sehingga efek agregatnya menjadi tidak signifikan.

Keempat, akses air layak (X4) memiliki pengaruh negatif terkuat terhadap kemiskinan ($\beta=-0,030$; $t=-15,49$; $p<0,01$). Nilai t-statistik X4 melampaui seluruh variabel lain, mengindikasikan keterbatasan akses air minum sebagai hambatan paling universal. Mekanisme transmisinya bekerja melalui: (1) jalur kesehatan, penyakit akibat air tidak layak menggerus anggaran rumah tangga; (2) jalur produktivitas; (3) jalur efisiensi, rumah tangga miskin membeli air 5–10 kali lebih mahal dari vendor; dan (4) jalur modal manusia jangka panjang melalui stunting (Aschauer, 1989; Mulyaningsih et al., 2023). Hasil ini diperkuat oleh berbagai temuan empiris sebelumnya yang menempatkan akses air bersih sebagai faktor kunci dalam penurunan kemiskinan (Budiono & Purba, 2021; Bunga & Haryanto, 2024; Putri & Samsuddin, 2025; Sukartini & Saleh, 2020).

Nilai Adjusted R² sebesar 0,944 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang sangat kuat, 94,41 persen variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh keempat variabel bersama efek tetap kabupaten. Uji F simultan ($F=182,16$; $p=0,000$) mengonfirmasi signifikansi bersama seluruh variabel.

SIMPULAN

Berdasarkan estimasi Fixed Effect Model pada 120 kabupaten di Pulau Sumatera periode 2015–2025, diperoleh empat temuan ilmiah utama. Pertama, pendidikan berpengaruh negatif signifikan ($\beta=-0,032$; $p<0,01$), mengonfirmasi teori human capital. Kedua, pekerja sektor pertanian berpengaruh positif signifikan ($\beta=+0,011$; $p<0,01$),

konsisten dengan model dual economy Lewis. Ketiga, pengeluaran makanan menunjukkan arah negatif namun tidak signifikan ($p=0,118$), mencerminkan ambiguitas mekanisme konsumsi dalam konteks kabupaten yang sangat heterogen. Keempat, akses air layak memiliki pengaruh negatif terkuat ($\beta=-0,030$; $t=-15,49$; $p<0,01$), menegaskan infrastruktur air minum sebagai hambatan kemiskinan paling universal. Model memiliki daya jelaskan sangat kuat (Adjusted $R^2=0,944$).

Implikasi kebijakan: (1) prioritaskan perluasan pendidikan menengah melalui beasiswa berbasis DTKS dan pendidikan vokasional; (2) dorong transformasi struktural ketenagakerjaan ke sektor non-pertanian; dan (3) investasikan infrastruktur air minum layak melalui program Pamsimas dan DAK Air Minum di kabupaten dengan akses rendah dan kemiskinan tinggi. Keterbatasan penelitian: belum memasukkan variabel pengeluaran pemerintah daerah dan akses kesehatan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan panel dinamis untuk menganalisis efek lag kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. dan Resha Moniyana Putri, S.E., M.Si. atas bimbingan yang diberikan, serta kepada Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Lampung dan Badan Pusat Statistik atas dukungan data yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 97–111.
- Alifah, A., Yozza, H., & Asdi, Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dengan Menggunakan Analisis Regresi Panel. *Jurnal Matematika UNAND*, 9(1), 53–61.
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Profil Kemiskinan di Indonesia*.
- Becker, G. S. . (1975). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (NBER). University of Chicago Press. <http://www.nber.org/books/beck75-1>
- Budiono, S., & Purba, J. T. (2021). Memerangi Kemiskinan melalui Partisipasi Pendidikan dan Air Bersih pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Media Ekonomi*, 28(1), 67–78. <https://doi.org/10.25105/me.v28i1.7572>
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2022). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- Faizal, J., Bahtia, A., & Sakti, R. K. (2025). The Influence of Education Level, Unemployment Rate, and Health Level on Economic Growth and Poverty Rate in Indonesia from 2010 to 2023. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(5). <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2024). Indonesia social progress: the role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 428–457. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>

- Lewis, A. (1954). *Economic development with unlimited supplies of labour* (Vol. 22). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Mailyn, F. D., & Kartika, M. (2025). Poverty Analysis in Indonesia's Ten Poorest Provinces: Socio-economic and Fiscal Determinants. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 10(2), 341–355. <https://doi.org/10.20473/jiet.v10i2.73258>
- Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100261>
- Mulyaningsih, T., Mohanty, I., Gebremedhin, T. A., Miranti, R., & Widyaningsih, V. (2023). Does access to water, sanitation, and hygiene improve children's health? An empirical analysis in Indonesia. *Development Policy Review*, 41(5). <https://doi.org/10.1111/dpr.12706>
- Nasrun, M. A., Fariastuti, F., & Indra, S. (2020). The Role of Agricultural Sector in Explaining Poverty in Indonesia: A Study Case of West Kalimantan. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(5), 297–303. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10334>
- Priyarsono, D. S., Wijaya, M. B. L. S. K., & Sigiro, E. E. (2022). Determinan kesenjangan kemiskinan desa-kota di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Purbowo, P. (2025). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pangan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(2), 183–198. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i2.96703>
- Purmini, P., & Rambe, R. A. (2021). Labor and Government Policies on Poverty Reduction in Sumatera Island, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 61–74. <https://doi.org/10.29259/jep.v19i1.13775>
- Putri, B. D., & Samsuddin, M. A. (2025). Pengaruh Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Panel Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020-2024. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i4.1611>
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Jayanti, A. D., & Ridzuan, A. R. (2023). Indonesia's poverty puzzle: Chronic vs. transient poverty dynamics. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267927>
- Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2020). Akses Air Bersih di Indonesia. *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 9(2), 89–98.
- Suparta, I. W., & Oktaviani, L. (2025). Determinants of Rural Poverty in Western Indonesia 2019-2023. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 2(2), 222–227. <https://doi.org/10.61132/ijems.v2i2.730>
- United Nations. (2025). *The Sustainable Development Goals Report*. <https://doi.org/unstats.un.org/sdgs/report/2025/>
- West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). *Structural Equation Models with Non-Normal Variables: Problems and Remedies* (K. A. Bollen & J. S. Long, Eds.). Sage.